



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kemenkeu Terpercaya

Arah dan Strategi Kebijakan Pelayanan dan Pengawasan BC

Jakarta, 19 Desember 2024

TUGAS DAN FUNGSI DJBC

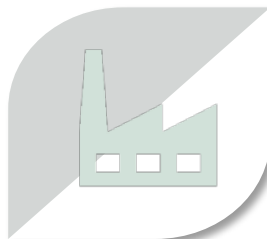
Mengoptimalkan penerimaan negara yang diperoleh melalui penerimaan Bea Masuk, PDRI, dan Cukai

**Revenue
Collector**



Memberikan dukungan kepada industri dalam negeri, dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif atau dapat bersaing dalam pasar internasional

**Industrial
Assistance**



**Community
Protector**



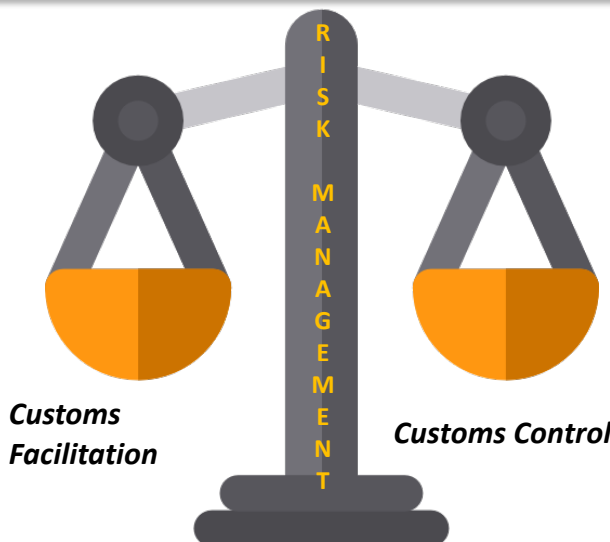
Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari **barang-barang yang dilarang maupun dibatasi** yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan dan keamanan juga moralitas

**Trade
Facilitator**



Memberikan fasilitas perdagangan dengan tujuan untuk menekan biaya yang tinggi, sehingga akan tercipta iklim perdagangan yang lebih kondusif

- Fasilitasi perdagangan dan industri
- *Ease Of Doing Business (EODB)*
- *Dwelling Time (DT)*



- Perlindungan masyarakat
- Pencegahan penyelundupan
- Optimalisasi penerimaan

KESEIMBANGAN ANTARA FASILITAS DAN PENGAWASAN



IMPLEMENTASI ARAH DAN STRATEGI UTAMA KEBIJAKAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN

Peningkatan Layanan kepada Pengguna Jasa



Simplifikasi
Proses
Administrasi



Digitalisasi
Layanan



Peningkatan
Customer
Experience



PENGUATAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN



01 Pemanfaatan
Teknologi dan
Data Analitik



02 Penindakan tindak
pidana



03 Kolaborasi
dengan
stakeholder



04

koordinasi dengan
pelaku usaha



05 pelatihan kepada
petugas dan
mengadakan
sertifikasi profesional



06 sosialisasi dan
edukasi kepada
masyarakat



07 Kerjasama
Internasional dan
Harmonisasi Regulasi

Implementasi Lartas TPT dan Besi Baja



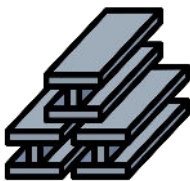
Dasar Peraturan

1. Permendag 36 Tahun 2023 jo. 08 Tahun 2024
2. Ditetapkan untuk diawasi oleh DJBC melalui Keputusan Menteri Keuangan



Tekstil dan Produk Tekstil

1. Diatur terhadap 515 HS Code
2. Dokumen izin berupa PI dan/atau LS
3. Pengecualian PI dan LS bagi API-P MITA/AEO
4. Pengecualian pemenuhan izin untuk pemasukan ke Kawasan Berfasilitas



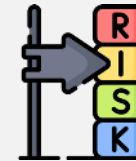
Besi atau Baja, Baja Paduan dan Turunannya

1. Diatur terhadap 518 HS Code
2. Dokumen izin berupa PI dan LS
3. Pengecualian LS bagi API-P MITA/AEO
4. Pengecualian pemenuhan izin untuk pemasukan ke Kawasan Berfasilitas

Pengawasan Pemenuhan Lartas



1. Otomasi penelitian Lartas melalui Sistem Indonesia National Single Window
2. Otomasi pemotongan kuota



1. Penjaluran berdasarkan manajemen risiko
2. Optimalisasi pemeriksaan fisik dengan Uji Lab (TPT dan Besi Baja)



Peningkatan pengawasan melalui **optimalisasi pemanfaatan mesin pemindai**

POLICY DILEMMA

OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR KEPABEANAN DAN CUKAI

Pengumpulan sebanyak-banyaknya penerimaan negara dari kegiatan ekspor, Impor dan Cukai



FASILITASI PERDAGANGAN DAN INDUSTRI

Pemberian Insentif Fiskal (Kepabeanan, Cukai dan Perpajakan) Yang Berpengaruh Terhadap Penerimaan Negara (*Short fall dan Tax Expenditure*)

Tuntutan Akuntabilitas atas Implementasi Kebijakan dan Ketepatan Sasaran atas Kebijakan Insentif Fiskal Pemerintah (DJBC)

WAJIB ↓

Sistem Monitoring, Pengawasan & Evaluasi atas Secara Komprehensif & Berkelanjutan untuk Memastikan Tingkat Efektivitas Kebijakan Insentif Fiskal melalui 3 Layer :



Efektivitas Proses Implementasi



Mengukur Dampak atas Kebijakan

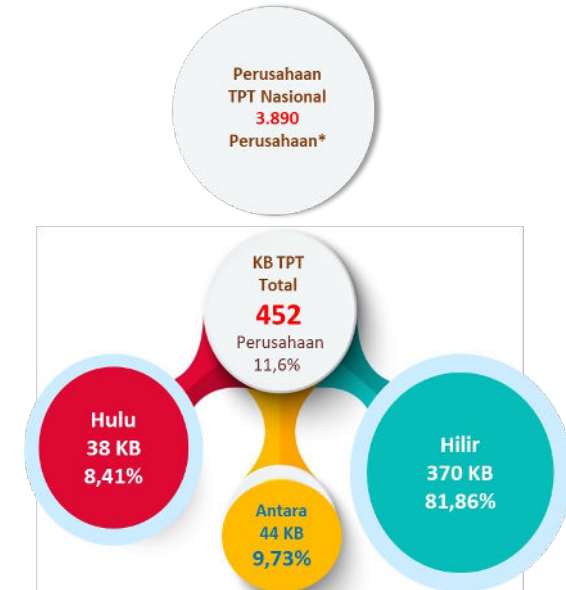
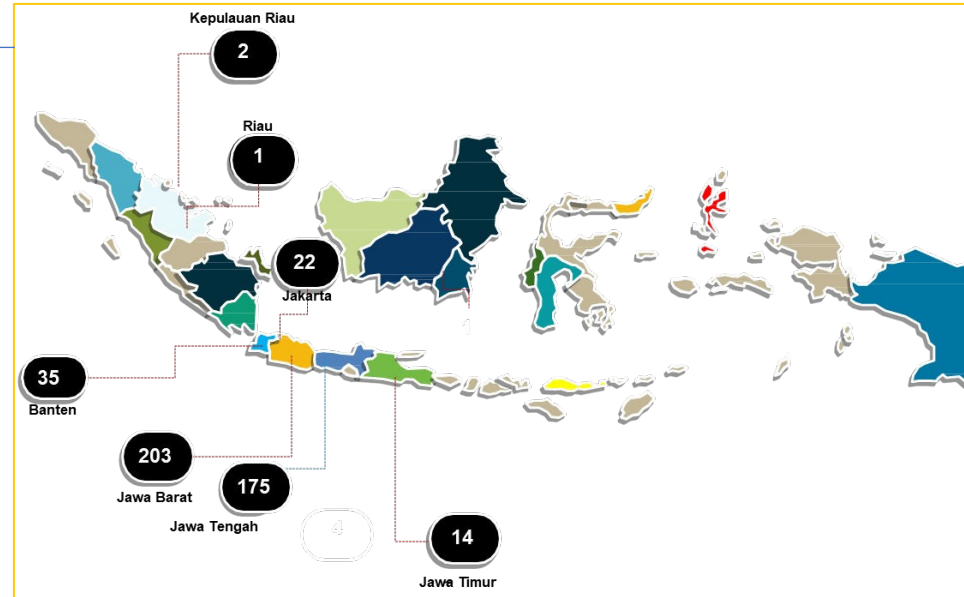
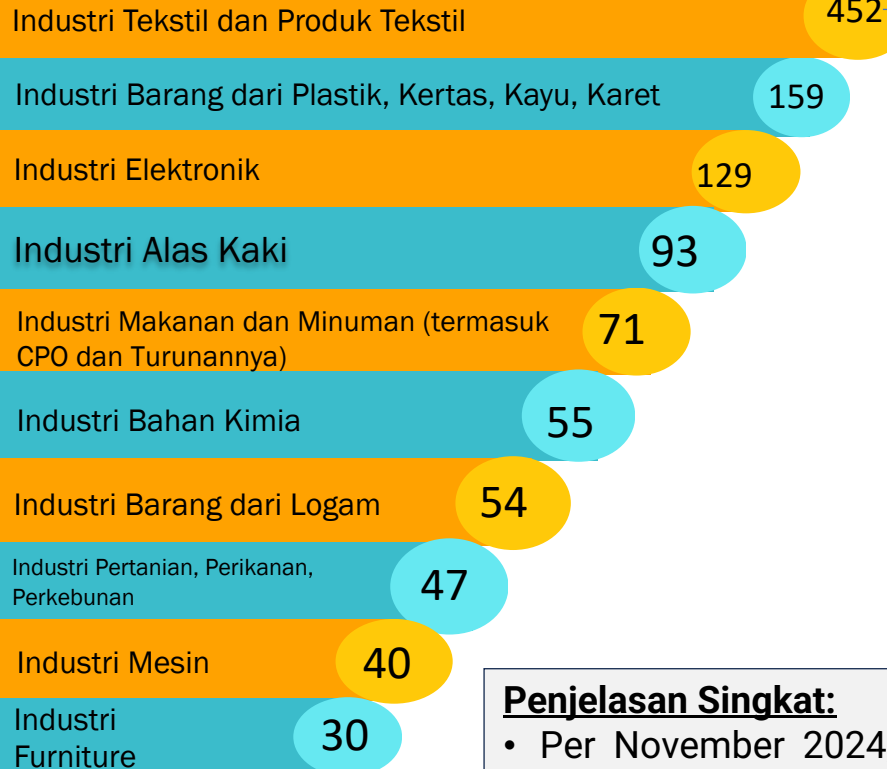


Menilai Manfaat dan Biaya



SEBARAN KAWASAN BERIKAT

10 Besar Komoditi KB



* sumber : Info BPS tentang Direktori Industri Manufactur 2024

Total KB

1455

Penjelasan Singkat:

- Per November 2024, jumlah Kawasan Berikat sebanyak 1.455 Perusahaan penerima fasilitas yang tersebar dalam 21 Kantor Wilayah dan 1 Kantor Pelayanan Utama. Jumlah Kawasan Berikat terbanyak berada pada sektor industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) sebanyak 452 Kawasan Berikat diikuti sektor industri Barang dari Plastik, Kertas, Kayu, Karet sebanyak 159 Kawasan Berikat.
- Jumlah KB TPT sebanyak 452 (11,6% dari total Perusahaan TPT Nasional) dengan komposisi hulu seperti Benang sebanyak 38 KB (8,41%), Antara seperti kain sebanyak 44 KB (9,73%) dan Hilir seperti garmen, pakaian sebanyak 370 KB (81,86%)



DAMPAK EKONOMI KAWASAN BERIKAT TAHUN 2023



JUMLAH PERUSAHAAN
1.435 Perusahaan



TOTAL FASILITAS
Rp. 72,03 Triliun



PENYERAPAN TENAGA KERJA **
1.752.042 orang



TOTAL EKSPOR
Rp. 1.634,97 Triliun



**RASIO EKSPOR
TERHADAP IMPOR**
4,38



**KONTRIBUSI TERHADAP
EKSPOR NASIONAL**
35,61%



PAJAK PUSAT *
Rp. 87,960 Triliun



PENAMBAHAN INVESTASI **
Rp. 194,84 Triliun



JUMLAH JARINGAN USAHA **
76.377
Fasilitas : 11.409
Non Fasilitas : 64.968



PAJAK DAERAH **
Rp. 5,810 Triliun



TOTAL NILAI TAMBAH **
Rp. 560,10 Triliun



INDIRECT ECONOMY ACTIVITY **
378.545
111.933 usaha Perdagangan
111.302 usaha Akomodasi
92.911 usaha Makanan
62.399 usaha Transportasi

Sumber Data :

* : Direktorat Jenderal Pajak

** : Kuesioner/Responden



Terima Kasih